BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara umum kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan, yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.

Menurut Syaiful Sagala, komite sekolah merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas di daerahnya.(Prastiya, 2022)

Nanang Fatah memberikan pengertian tentang komite sekolah dalam bukunya, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah, "Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokrasi oleh para *stake holders* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan"

Lebih lanjut oleh Djam'an Satori dalam bukunya Mulyono, mengatakan bahwa "komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah."

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite sekolah menjadi wadah/forum untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyadarkan masyarakat atas peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

2. Tujuan Komite Sekolah

Tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di madrasah.
b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
c. Menciptakan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu dalam sekolah.

Selain itu, dalam bukunya Engkoswara yang berjudul Adminitrasi Pendidikan menjelaskan tujuan komite sekolah, yaitu:

a. Mewadahi dan meningkatkan peranserta para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sekolah, pengembangan program sekolah, monitoring pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, dan pertanggung jawaban mutu pendidikan sekolah secara demokratis dan transparan.
b. Mewadahi dan meningkatkan peranserta para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi sekolah, dan membantu pemerintah memonitoring pengelolaan pendidikan di sekolah.
c. Memfasilitasi upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme kepala sekolah, guru, dan staf lain yang terlibat dalam proses pendidikan anak sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah.
d. Menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sekolah dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung belajar yang baik, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah yang baik, dan peningkatan kualitas staf yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
e. Mengembangkan dan menetapkan program kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat, kebutuhan dan tuntutan global, serta berbagai inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

f. Memfasilitasi dan mengontrol penerapan sistem manajemen sekolah yang transparan dan demokratis dalam pendayagunaan berbagai sumber daya yang tersedia sesuai dengan prioritas kebutuhan pelaksanaan program sekolah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dari keterangan di atas, dapat kesimpulan tentang tujuan dibentuknya komite sekolah ialah sebagai wadah masyarakat untuk menyalurkan pendapatnya terhadap setiap kebijakan yang akan diambil oleh sekolah. Dengan masyarakat ikut andil dalam setiap kebijakan sekolah maka dapat menciptakan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap sekolah dan menciptakan lingkungan yang damai.

3. Fungsi Komite Sekolah

Banyak pendapat para ahli yang memberikan pandangan terkait fungsi komite sekolah. Adapun fungsi komite sekolah menurut Mulyasa dalam buku Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik mengemukakan bahwa fungsi dari komite sekolah yaitu:

a. Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan melaksanakan kebijakan pendidikan.
b. Mendukung (*supporting agency*) kerja sama sekolah dengan masyarakat, baik secara finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
c. Mengontrol (*controlling agency*) kerja sama sekolah dengan masyarakat dan output pendidikan. d. Mediator antara sekolah, pemerintah (*eksekutif*), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/legislatif), dengan masyarakat.
d. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikanang bermutu.
e. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi, dunia kerja, pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
f. Menyampaikan masukan, pertimbangan, usulan kepada pemerintah daerah, yang berhubungan dengan kebijakan dan program pendidikan (Wahyudi, 2015)

Adapun fungsi komite sekolah menurut Djam'an Satori yang dikutip oleh Mulyono, menjelaskan fungsi komite sekolah sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan strategi sekolah, yaitu strategi pengembangan sekolah dalam perspektif 3-4 tahun mendatang.
b. Penyusunan perencanaan tahunan sekolah, yang merupakan elaborasi dari perencanaan strategi sekolah.
c. Mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah. d. Memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan bagi pengemban keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi stakeholder sekolah.
d. Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring (school self-assesment) dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah.
e. Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/ institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu (*quality assurance*) serta memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai dengan tuntutan standar minimum kompetensi siswa (*basic minimum competency*) seperti yang diatur dalam PP No.2 tahun 2000.
f. Membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh penerimaan komite sekolah
g. Memantau kinerja sekolah, yang meliputi manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar-mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar siswa, disiplin dan tata tertib sekolah, prestasi sekolah, baik dalam aspek intra maupun ekstrakulikuler.

beberapa penjelasan mengenai fungsi komite sekolah dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komite sekolah menyebabkan lahirnya tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat dalam membangun pendidikan. Sehingga masyarakat dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam

memajukan pendidikan di suatu lembanga sehingga suatu lembaga bisa lebih maju dan lebih baik lagi.

4. Peran Komite Sekolah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orangtua, masyarakat dan pemerintah. Namun sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Bisa dikatakan tanggung jawab *stakeholder* masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Adapun peran komite sekolah menurut (Pohan, 2024) yaitu:

a. Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pelaksanaannya sejauh pengamatan peneliti dalam bentuk pemberian masukan dalam hal sarana dan prarana, pengelolaan pendidikan, memberikan masukan terkait RAPBS, meberikan masukan seperti pelaksanaan program atau kegiatan sekolah. Salah satu bentuk nyata yaitu saat proses akreditasi sekolah, komite dan sekolah saling bekerjasama. Bentuk kerjasama komite yaitu memberikan masukan dan dukungan menyiapkan dokumen pendukung agar memperoleh hasil memuaskan.

b. Peran komite Sekolah Sebagai Pendukung

Selain itu peran komite sebagai pendukung sekolah baik dalam pencapaian tujuan sekolah dan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dukungan yang diberikan komite sekolah berupa materil dalam bentuk sarana yang belum ada disekolah dan dibutuhkan oleh sekolah seperti penyediaan sarana untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Melakukan koordinasi dukungan dana dari orang tua murid ke sekolah, dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran sekolah.

c. Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol

Peran komite sebagai pengontrol ditunjukan dalam bentuk pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah, melakukan kontrol terhadap kualitas kebijakan yang diambil sekolah,

melakukan pengawasan terhadap proses dan kualitas perencanaan dan program sekolah, dan melakukan pengawasan terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah.Selain itu komite sekolah juga berperan serta dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana baik yang berasal dari donatur maupun pemerintah dapat benar-benar efektif dan termonitor alokasinya, apakah sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

d. Peran Komite Sekolah Sebagai Mediator

Peran komite sebagai mediator wujudnya berupa penghubung antara kepala sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah dengan dewan pendidikan serta kepala sekolah dengan sekolah itu sendiri dalam hal ini Guru, staf karyawan dan murid, selain itu komite juga ikut serta dalam membuat usulan kebijakan dan beberapa program pendidikan kepada sekolah. Menjadi penampung aspirasi masyarakat dalam hal ini berupa pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan dan menyampaikannya keluhan kepada sekolah. Dengan adanya peran komite sekolah sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat maka akan mempermudah masyarakat dalam menyalurkan apa saja yang menjadi aspirasi mereka, dan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dapat dijadikan masukan untuk sekolah sehingga sekolah dapat mengoreksi apa saja kekurangan yang ada disekolah dan secara bersama-sama dengan masyarakat.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap komite sekolah harus mengetahui akan perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan serta sebagai pemberi pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengontrol, dan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di sekolah (Pohan, 2024)

5. Keanggotaan dan Kepengurusan Komite Sekolah

a. Keanggotaan komite sekolah

Menurut (Kosali, 2020) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:

1) orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
2) toko masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
   a. memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
   b. anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.

3). Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:

   a. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
   b. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

4). Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

b. Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

c. Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:

1) pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
2) penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
3) pemerintah desa;
4) forum koordinasi pimpinan kecamatan;
5) forum koordinasi pimpinan daerah;
6) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7) dan/atau pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Dari yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan yang telah terpilih secara musyawarah.

6. Hubungan Sekolah Dengan Komite (Masyarakat)

Menurut(Kompasiana.com, 2024) hubungan antara sekolah dengan komite sekolah (yang merupakan representasi masyarakat) menjadi kunci utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Komite sekolah berfungsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam pendidikan, serta sebagai mitra sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pendidikan. Bentuk hubungan ini dapat berupa:

a. Kolaborasi Program Pendidikan: Sekolah dan komite bersama-sama merancang program kerja yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.
b. Penggalangan Dukungan: Komite membantu sekolah dalam mendapatkan dukungan finansial maupun non-finansial dari masyarakat.
c. Penyelesaian Masalah: Komite menjadi mediator dalam menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi oleh sekolah maupun masyarakat terkait pendidikan.
d. Pengawasan dan Evaluasi: Bersama dengan sekolah, komite turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan rencana.

Hubungan yang harmonis antara sekolah dan komite sekolah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan pendidikan. Epstein (1995) menyebutkan bahwa sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat akan menghasilkan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi peserta didik.

7. Langkah-Langkah Komite Sekolah dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

a. Perencanaan dan Kebijakan.
   1) Penyusunan Kebijakan Pendidikan: Komite sekolah terlibat dalam penyusunan kebijakan sekolah, termasuk program akademik, anggaran, dan kegiatan ekstrakurikuler.
   2) Perumusan Visi dan Misi Sekolah: Komite bertanggung jawab untuk membangun dan mengevaluasi tujuan, visi, dan misi sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal (Arifudin, 2024)

b. Peningkatan kapasitas.

1) Capacity Building: Meningkatkan kapasitas atau kompetensi semua orang di sekolah, termasuk guru, staf, dan kepala sekolah. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan orang tua dan menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa.
2) Program Pengembangan dan Pelatihan: Mengadakan pelatihan guru tentang pendekatan pembelajaran inovatif, melatih kepala sekolah tentang manajemen sekolah, dan memberikan pelatihan tambahan kepada staf administratif (Susanto, 2016)

c. Mobilisasi Sumber Daya.

1) Menurut Permendikbud No. 75/2016, penggalangan dana Komite Sekolah dapat mengembalikan dana, tetapi dengan persyaratan berikut: Tidak ada pungutan wajib kepada orang tua atau wali murid dan Dana yang dikumpulkan harus dikelola dengan cara yang jelas dan jujur.
2) Dukungan Bukan Keuangan: Menggalakkan partisipasi tenaga ahli dari masyarakat, mendukung program magang dan praktek kerja, dan menyediakan narasumber untuk kegiatan ekstrakurikuler.

d. Pengawasan dan Monotoring.

1) Supervisi Kualitas Pendidikan: Kontrol pembelajaran di kelas, evaluasi kinerja guru dan karyawan, dan pengawasan penggunaan anggaran dan fasilitas sekolah.
2) Pelaporan Berkala: Komite Sekolah harus menyampaikan laporan kepada masyarakat, kepala sekolah, dan orangtua/wali peserta didik setidaknya sekali setiap semeste (Humas, 2017)

e. Kolaborasi dengan Masyarakat.

1) Kemitraan Strategis: Bekerja sama dengan semua pihak untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi dan mendorong peningkatan komitmen dan perhatian masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas tinggi.
2) Aspirasi dan Komunikasi memeriksa dan menyimpan gagasan, keinginan, dan kebutuhan pendidikan masyarakat.

f. Implementasi Progra Program Studi.

1) Program Akademik: Mengembangkan program pengobatan dan pengayaan, mendukung program literasi dan numerasi, dan mendukung olimpiade dan kompetisi akademik.
2) Program Tidak Akademik: Mengembangkan kegiatan luar kelas yang relevan, membantu program keterampilan hidup, dan mendukung aktivitas seni dan budaya lokal.

Setiap elemen pendidikan seperti guru, kepala sekolah, siswa, orang tua dan wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan harus mendukung upaya Komite Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk mencapai peningkatan pendidikan yang optimal dan berkelanjutan, langkah-langkah ini harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan.

B. Kerjasama Sekolah dan Masyarakat

1. Pengertian Kerjasama Sekolah dan Masyarakat

Menurut(Razak, 2020) Pengertian kerjasama sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Masyarakat sebagai penghubung dari pihak sekolah dengan masyarakat harus selalu dipelihara dengan baik karena sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat, tidak bisa lepas darinya sebagai partner sekolah dalam mencapai kesuksesan sekolah itu sendiri.

Kerjasama dengan pemerintah atau masyarakat secara umum dalam era otonomi sekolah, khususnya dengan implementasi pendekatan manajemen sekolah berbasis masyarakat, sekolah memeng memiliki keleluasaan dan atau otonomi yang lebih luas. Otonomi pemerintah yang berbasis pada pemerintah daerah kabupaten atau kota meletakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan berada di tingkat kabupaten dan kota, sehingga nampaknta peranan

pemerintah provinsi dan pusat tidak dominan. Meskipun demikian bukan berarti pusat dan propinsi tidak memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan. Dalam paradigma otonomi seperti sekarang diperlukan kemampuan sekolah (baca kepala sekolah) untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai institusi pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten, kota, kecamatan bahkan kelurahan.

Masyarakat adalah suatu perwujudan kehidupan bersama manusia. Dalam masyarakat berlangsung proses kehidupan social, proses antara hubungan dan interaksi. Di dalam masyarakat sebagai suatu lembaga kehidupan manusia berlangsung pula keseluruhan proses perkembangan kehidupan. Dengan demikian masyarakat dapat diartikan sebagai wadah atau medan tempat berlangsungnya interaksi warga masyarakat itu. Tetapi masyarakat dapat pula diartikan sebagai subyek, yakni sebagai perwujudan warga masyarakat dengan semua sifat (watak) dalam suatu gejala dan manifestasi tertentu atau keseluruhan, sosio-psikologisnya.

Masyarakat adalah sekunder, kurang penting. Tugasnya ialah hanya menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk perkembang keseorangan. Masyarakat tidak dapat berdiri tanpa keseorangan. Dalam pendidikan pendirian tersebut menimbulkan suatu aliran yang menghendaki, bahwa pendidikan itu hanya bertujuan untuk mengembangkan pribadi anak dengan segala bakat yang terdapat padanya. Tujuannya, kalau mungkin agar anak menjadi Uembermensch, manusia luar biasa, manusia kuasa.

Dari lahir sampai mati manusia hidup sebagai anggota masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orangorang di sekitar dan dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam tiap masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah sebagai lembaga sosial, terasa amat kuat dan berpengaruh pula kepada para individu-individu yang ada dalam lingkungan sekolah.

Ada dua hal penting yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu: bagaimana memperoleh dukungan perbaikan dari masyarakat dan yang kedua,

bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya yang diperoleh secara tepat, sehingga mampu meningkatkan proses mengajar dan belajar.

2. Hubungan Kerjasama Sekolah Dan Masyarakat

Sekolah memiliki hubungan yang sangat penting dengan masyarakat (Humas). Sekolah membutuhkan masukan masyarakat dalam menyusun program dan mendukung pelaksanaannya. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan layanan sekolah untuk menyediakan program pendidikan yang efektif.

Hubungan dengan masyarakat (Humas) akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dan keikutsertaannya dalam program sekolah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah..Dengan demikian, maka hubungan sekolah dengan masyarakat (Humas) merupakan proses dengan masyarakat dan merupakan proses yang direncanakan dan sungguh-sungguh serta pembinaannya yang dilakukan secara kontinu untuk mendapat simpati dari masyarakat, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien(Hidayat, 2017)

3. Bentuk Kerjasama Sekolah Dan Masyarakat

Kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat mempunyai peranan penting dalam memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai bentuk kerjasama yang dapat melakukan berbagai bentuk kolaborasi dengan masyarakat, termasuk dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan masyarakat dengan industri, komunitas lokal, pemerintah, dan organisasi non-profit. Melalui kemitraan tersebut, institusi dapat mengintegrasikan pengalaman praktis dan mendukung pertumbuhan siswa secara holistik sekaligus memberikan manfaat penting bagi masyarakat sekitar.

Institusi pendidikan memiliki tugas yang lebih besar dari sekedar menyelenggarakan pendidikan. Mereka dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menjadi agen perubahan, memberikan dampak positif terhadap lingkungan mereka, dan membantu siswa memperoleh keterampilan dunia

nyata. Ada banyak bentuk kerja sama yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatkan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai bentuk kerja sama yang dapat di kembangkan dengan berbagai institusi menurut (Kompasiana.com, 2024)tersebut antara lain:

a. Kerjasama dengan industri Lembaga pendidikan dapat menjalin kerja sama dengan industri dalam berbagai cara, mulai dari program magang, kunjungan industri, pembicara tamu hingga pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Partisipasi langsung dalam kehidupan kerja membantu siswa memahami penerapan praktis dari apa yang mereka pelajari di kelas.
b. Kemitraan dengan masyarakat lokal Kemitraan dengan masyarakat lokal dapat mencakup proyek layanan masyarakat, program sukarelawan atau kegiatan kolaboratif lainnya. Ini membantu siswa memahami peran mereka dalam masyarakat dan menciptakan rasa empati dan tanggung jawab sosial.
c. Kerjasama dengan negara Lembaga pendidikan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan program pendidikan yang mendukung kebijakan publik, memperkuat infrastruktur pendidikan atau memberikan layanan pendidikan yang lebih luas dan adil kepada masyarakat.
d. Kemitraan dengan Organisasi Nirlaba Kemitraan dengan organisasi nirlaba dapat membuka pintu bagi proyek inovatif, program hibah, atau pengembangan sumber daya yang tidak tersedia secara langsung melalui lembaga itu sendiri. Keuntungan kerjasama antara lembaga pendidikan dan masyarakat:
    1) Pendidikan holistik: Bentuk kerjasama ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang utuh dengan menggabungkan teori dan praktek serta mempersiapkan siswa untuk kehidupan nyata
    2) Keterlibatan masyarakat: Masyarakat lebih berpartisipasi dalam proses pendidikan, sehingga menciptakan hubungan yang lebih kuat antara lembaga pendidikan dan lingkungan sekitarnya.
    3) Meningkatkan kualitas pendidikan: Dengan tambahan sumber daya dan pengalaman praktis, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas

pengajaran dan pembelajaran (Razak, 2020).

Semua yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kerja sama antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat menguntungkan.Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar siswa, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.Lembaga pendidikan dapat terus menjadi pusat inovasi dan pembaharuan untuk memberikan pendidikan bermakna bagi generasi mendatang dengan terus mengembangkan dan memperluas bentuk kerjasama ini.

4. Fungsi Kerjasama Sekolah dan Masyarakat

Menurut(Salbila, 2019) Fungsi pokok kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat umumnya serta publik khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo pada sekolah tersebut. Hal ini akan membantu sekolah mensukseskan program-programnya. Sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Fungsi kerjasama sekolah dengan masyarakat diantarnya sebagai berikut:

a. Mengatur kerjasama sekolah dengan orang tua.
b. Memelihara hubungan baik dengan komite sekolah.
c. Memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembagalembaga pemerintah, swasta dan organisasi nasional.
d. Memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam tehnik komunikasi (Majalah, surat kabar dan mendatangkan sumber).

Adapun fungsi kerja sama sekolah dengan masyarat menurut(Hidayat, 2017) diantarnya sebagai berikut :

a. Mengatur hubungan sekolah dengan orang tua.
b. Memelihara hubungan baik dengan komitte sekolah.
c. Memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan organisasi nasional.
d. Memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacammacam tehnik komunikasi (majalah, surat kabar dan mendatangkan sumber)

5. Tujuan Kerjasama Sekolah dan Masyarakat

Tujuan kerjasama antara sekolah dan masyarakat adalah untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan siswa. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari kerjasama tersebut:

a. Meningkatkan Mutu Pendidikan

1) Mengintegrasikan sumber daya masyarakat untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah.
2) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sekitar.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Siswa

1) Mendukung kebutuhan siswa, baik secara material, emosional, maupun sosial, melalui kolaborasi dengan masyarakat.
2) Memberikan bantuan atau program beasiswa bagi siswa yang membutuhkan.

c. Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif

1) Melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar sekolah.
2) Mendukung program sekolah seperti kebersihan, kesehatan, dan penghijauan.

d. Meningkatkan Partisipasi Orang Tua

1) Menguatkan peran orang tua dalam pendidikan melalui komunikasi aktif dengan sekolah.
2) Mengadakan program pelibatan orang tua, seperti parenting class, seminar, atau kegiatan ekstrakurikuler bersama.

e. Mengembangkan Potensi Siswa

1) Melibatkan masyarakat dalam menyediakan fasilitas atau pelatihan tambahan yang mendukung bakat dan minat siswa.
2) Menghubungkan siswa dengan dunia kerja melalui kegiatan magang atau kunjungan industri.

f. Memperkuat Hubungan Sosial dan Solidaritas

1) Menjadikan sekolah sebagai pusat kegiatan sosial yang dapat mempererat hubungan masyarakat.
2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam acara sekolah seperti peringatan hari besar, lomba, atau bazar.

g. Menanamkan Nilai-Nilai Sosial

1) Mendorong siswa untuk memahami pentingnya kontribusi kepada masyarakat.
2) Mengajarkan nilai-nilai kerja sama, tanggung jawab sosial, dan budaya lokal.

Dengan uraian di atas dapat di simpulkan bahwasanya dengan menjalin kerjasama yang baik, sekolah dan masyarakat dapat bersinergi untuk membangun generasi yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan (Natsir dkk., 2018)

C. Mutu Pendidikan

Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia saat ini, masalah kualitas pendidikan merupakan salah satu masalah nasional yang sedang dihadapi. Untuk bisnis atau lembaga yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa, mutu merupakan salah satu tujuan pencapaian karena dapat berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan. Namun, pandangan setiap orang terhadap mutu sebenarnya dapat berbeda, karena sifat relatif dari mutu dapat berbeda pada setiap perspektif atau pemikiraan individu dan dapat berubah-ubah. Pengertian kualitas pendidikan akan dibahas secara khusus dalam diskusi ini (Effendi, 2008)

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa arab حسن " artinya baik" , dalam bahasa Inggris "*quality* artinya mutu, kualitas" . Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia "Mutu adalah (ukuran), baik buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb)" . Secara istilah mutu adalah "Kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan" . Dengan demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan.

Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah “Sebuah wasilah untuk mencapai kemulian dan menyerahkan jiwa untuk mendekat diri kepada Tuhan”. Berdasarkan Undang Undang Sisdiknas No. II Tahun 2003 pendidikan adalah : Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Siregar dkk., 2023) “Berdasarkan tinjauan mutu pendidikan dari segi proses dan hasil mutu pendidikan dapat dideteksi dari ciri-ciri sebagai berikut : kompetensi, relevansi, fleksibelitas, efisiensi, berdaya hasil, kredibilitas” . Menurut Mujamil mutu pendidian adalah “Kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin”

Berdasarkan beberapa pendapat, kualitas pendidikan didefinisikan sebagai proses pengajaran dan pelatihan yang bertujuan untuk mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengajaran dan pelatihan. Di bidang pendidikan, mutu meliputi input, proses, output, dan hasil. Input pendidikan bermutu jika siap digunakan, dan proses pendidikan bermutu jika dapat membuat lingkungan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.

2. Karakteristik Mutu Pendidikan

Husaini Usman 2006 di dalam jurnal (Isnaini, 2008) Mengemukakan 13 karakteristik mutu pendidikan, yaitu sebagai berikut:

a. Kinerja (performa) yakni berkaitan dengan aspek fungsional sekolah, meliputi: kinerja guru dalam mengajar, baik dalam memberikan penjelasan, meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, serta menyiapkan bahan pelajaran lengkap, pelayanan administratif dan edukatif sekolah baik dengan kinerja yang baik setelah menjadi sekolah pavorit.
b. Waktu ajar (*timelines*) yakni sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu.
c. Handal (*reliability*) yakni usia pelayanan bertahan lama. Meliputi pelayana pima

yang diberikan sekolah bertahan lama dari tahun ketahun, mutu sekolah tetap bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ketahun.

d. Data tahan (*durability*) yakni tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan.
e. Indah (*aesteties*) misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru menmbuat media-media pendidikan yang menarik.
f. Hubungan manusiawi (*personal interface*) yakni menjunjung tinggi nilai-nilai-nilai moral dan profesionalisme, misalnya warga sekolah saling menghormati, demokrasi, dan menghargai profesionalisme.
g. Mudah penggunaannya (*easy of use*) yakni sarana dan prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu.
h. Bentuk khusus (*feature*) yakni keunggulan tertentu misalnya sekolah unggulan dalam hal penguasaan teknologi informasi.
i. Standar tertentu (*comformence to specification*) yakni memenuhi standar tertentu, misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal.
j. Konsistensi (*concistensy*) yakni keajengan, konstan dan stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang, warga sekolah konsisten dengan perkataannya.
k. Seragam (*unuformity*) yakni tanpa pariasi, tidak tercampur.
l. Mampu melayani (*serviceability*) yakni mampu memberikan pelayanan prima.
m. Ketepatan (*acuracy*) yakni ketepatan dalam pelayanan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa atribut kualitas pendidikan menjadi tolak ukur dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, berfokus pada kebutuhan pelanggan saat ini dan di masa mendatang. Pemimpin harus terlibat dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan bekerja sama dengan sumber daya manusia yang mempuni untuk memberikan pelayanan pelanggan pendidikan yang terbaik.

3. Standar Mutu Pendidikan

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:

a. Standar kompetensi lulusan, merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
b. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
c. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenaipendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, sertapendidikan dalam jabatan.
e. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustkaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
f. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
g. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
h. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa standar mutu pendidikan adalah standar yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai kualitas pendidikan. Ini akan berdampak langsung pada kepuasan pelanggan pendidikan, baik internal maupun eksternal, terlepas dari delapan standar nasional pendidikan.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sedangkan sekolah, terutama di kota-kota, menunjukan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memperihatinkan.

Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan menjadi agenda utama semua birokrasi pendidikan, semua komponen yang ada di sekolah, semua orang tua dan wali murid, serta pihak-pihak lainnya yang memiliki jaringan langsung atau tidak terhadap dunia pendidikan. Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh banyak pihak, apakah pemerintah, masyarakat, sekolah, orangtua dan siswa itu sendiri (Prastiya, 2022)

Sedikitnya ada empat faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Berikut pembahasan menurut Maslikhah: Pertama, fungsi dan tujuan pendidikan kurang melekat pada pelaksana dan pelaksanaan pendidikan. Kedua, prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kegamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa tidak dijadikan sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Ketiga, pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan bersifat hanya lips service. Keempat, evaluasi pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepad public seringkali dibelokkan dengan kepentingan tertentu.

Menurut Isjoni, pembangunan pendidikan hendaknya diarahkan kepada beberapa faktor yang merupakan kebutuhan mendasar, diantaranya yaitu:

a. Pertama, sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan ruang belajar, renovasi dan rehabilitasi ruang belajar beserta perangkat pendukungnya, ruang laboratorium, perpustakaan, komputer, pusat sumber belajar, dan termasuk

rumah guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, WC guru dan murid.

b. Kedua, sarana dan prasarana pembelajaran, berkaitan dengan pengadaan alat dan media pembelajaran, untuk bidang IPA, IPS, Bahasa, dan bidang lainnya. Selanjutnya seperangkat alat praktek laboratorium (IPA, Matematika, IPS, Bahasa), buku-buku pegangan guru dan siswa di semua jenjang dan jenis pendidikan, serta bukubuku untuk perpustakaan.
c. Ketiga, Pembangunan sumber daya manusia.
d. Keempat, Pembangunan sektor Pendidikan Luar Sekolah.
e. Kelima, pembangunan life skill, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA

Sedangkan dalam bukunya Sri Minarti yang berjudul Manajemen Sekolah, untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (school based management), yaitu sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan.
b. Pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi (community based education) ketika terjadi interaksi yang posisif antara sekolah dan masyarakat, sekolah sebagai community learning center.
c. Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigm yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau learner menjadi manusia yang diberdayakan.

Lebih lanjut, dalam bukunya Mujamil Qomar menjelaskan bahwa faktor yang memberikan kontribusi terhadap mutu, yaitu:

a. Siswa, terutama yang menyangkut kesiapan dan motivasi belajarnya.
b. Guru, terutama menyangkut kemampuan profesional, moral kerja (kemampuan personal), dan kerja samanya (kemampuan sosial).
c. Kurikulum, terutama yang menyangkut relevansi isi dan operasionalisasi proses pembelajarannya.
d. Dana, sarana, dan prasarana, terutama menyangkut kecukupan dan efektivitas dalam mendukung proses pembelajaran.
e. Masyarakat (orangtua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi) terutama menyangkut partisipasi mereka dalam pengembangan program-program pendidikan di sekolah.

Beberapa mempertimbangkan pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan menitik beratkan pada peningkatan elemen-elemen yang ada di dalam satuan pendidikan dan pembangunan mutu secara keseluruhan dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan satuan pendidikan secara keseluruhan, peningkatan mutu pendidikan Bagian penting dari keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Ketersediaan ini menentukan bagaimana guru akan mengajar dengan lebih baik dan seberapa baik hasil belajar siswa dalam situasi di mana tidak ada sarana pembelajaran dalam kelas.

E. Kajian Penelitian Terdahulu.

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki persaan ataupun ketidak samaan tentang peran komite sekolah dalam membangun kerjasama sekolah dan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan mi miftahul ulum jogoroto jombang. Demikian beberapa kajian penelitian terdahulu yang dapat peneliti paparkan.

Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	(Zubaedi,2023): "Peran Komite Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar" — komite sekolah sangat efektif meningkatkan mutu pendidikan di era saat ini.	Keduanya meneliti peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.	(Zubaedi,2023) hanya berfokus pada peran komite terhadap mutu pendidikan, sedangkan penelitian ini lebih luas dengan mengkaji kerjasama komite sekolah bersama masyarakat.

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
2	(Mar'ati, 2022): "Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan" — komite sekolah membantu sekolah dalam penyediaan fasilitas yang sebelumnya belum tersedia.	Keduanya membahas peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.	(Mar'ati, 2022) lebih terfokus pada aspek penyediaan fasilitas, sedangkan penelitian ini mencakup bentuk kerjasama yang lebih luas antara komite sekolah, pihak sekolah, dan masyarakat.
3	(Asrofi dkk., 2025): "Peran Strategis Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan" — peran strategis komite sekolah sangat efektif dan membantu sekolah.	Keduanya mengkaji peran komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.	(Asrofi dkk., 2025) berfokus pada peran strategis komite dalam layanan pendidikan, sedangkan penelitian ini lebih luas dengan membahas kerjasama aktif antara komite sekolah, pihak sekolah, dan masyarakat secara terintegrasi.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, terdapat benang merah yang menghubungkan seluruh penelitian tersebut, yakni sama-sama mengkaji peran komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. (Zubaedi, 2023) membuktikan bahwa peran komite sekolah sangat efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar, sementara (Mar'ati,2022) menunjukkan kontribusi nyata komite sekolah dalam pemenuhan fasilitas sekolah, dan (Asrofi dkk, 2025) menegaskan bahwa peran strategis komite sekolah terbukti sangat membantu peningkatan mutu layanan pendidikan. Meskipun demikian,